



Hujan, Lubang Tak Kelihatan

Dua Bulan Pasca-OTT KPK, Pemkot Belum Perbaiki

JOGIA, Radar Jogja - Dua bulan lebih pasca-operasi tangkapan (OTT) KPK, terkait kasus perbaikan saluran air hujan (SAH) di Jalan Babaran, Pemkot Jogja belum bereaksi. Bahkan seiring dengan mulai turunnya hujan, warga kembali terkena getahnya.

Ketua RT 38, Kelurahan Pandean, Umbulharjo, Jaka Prakosa, mengatakan hujan mengakibatkan lubang-lubang itu terisi air. Bahkan jika hujannya deras dalam waktu yang lama, tidak menutup kemungkinan air da-

lam lubang akan setara dengan jalan. "Lubangnya jadi tidak terlihat," keluhnya kemarin (2/11).

Dia mencontohkan, di sisi timur salurannya tertutup, karena lubangnya pas di depan rumah warga. Karena harus untuk aktivitas, lubangnya ditimbun dan dipasak. "Tapi penimbunan itu membuat saluran tertutup jadi air tidak bisa mengalir ke timur," katanya.

Hujan juga menyebabkan bau dari lubang proyek kian menyengat, karena mendapat suplai air kotor dari saluran di atasnya. "Kalau bau ya jelas bau, sudah dari dulu, tapi warga di sini hidungnya sudah kebal," ungkapnya.

Dia juga mengkhawatirkan timbulnya potensi penyakit.

Meluapnya air kotor dari lubang proyek itu, kata dia, sangat mungkin membawa benih penyakit, apalagi jika sampai meluap. Lokasi proyek yang berada di permukiman padat semakin memperbesar potensi ini.

Dia menceritakan, jika sebelumnya telah dua kali mengirimkan surat ke Pemkot menuntut kejelasan proyek tersebut. Namun katanya, sejauh ini tidak ada respon dari Pemkot kecuali sekedar petugas yang meninjau lokasi dan menyiram untuk mengurangi debu. "Sekarang sudah disiram alam," sindirnya.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengatakan persoalan ini menjadi dilema dan akan terus berlanjut. Di satu sisi

Pemkot Jogja tidak berani untuk melanjutkan proyek dengan dalih kehati-hatian dan menunggu surat dari KPK. Sementara di sisi lain warga sekitar membutuhkan adanya kepastian atas kelanjutan proyek SAH tersebut. "Karena selain mengalami kerugian secara materi khususnya warga punya usaha, juga mengingat sekarang sudah masuk musim hujan ditakutkan banjir dan tanah longsor disekitar lokasi proyek SAH," kata dia.

Pun hasil pemantauan Forpi, Jumat (1/11) tidak banyak berubah kondisinya dari sebelumnya. Dimana yang nampak berubah adalah tanaman jagung yang sudah mulai meninggi. Dengan tanaman yang sudah meninggi bisa jadi menghalangi penglihatan para pengendara sepeda motor yang melintas baik dari arah barat ke timur maupun sebaliknya. "Kami kembali mengingatkan kepada pemkot supaya intensif melakukan komunikasi dengan pihak KPK perihal fatwa hukum atas kelanjutan proyek SAH itu," tuturnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebenarnya sudah memberikan rekomendasi untuk memutus kontrak pemenang tender. Tapi Pemkot Jogja memilih menunggu surat dari KPK. "Saya juga khawatir kalau hujan banjir, tapi itu kan masih proses hukum, masih jadi barang bukti," kata Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti beberapa waktu lalu. (cr15/pr/zl)

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Yogyakarta,
Kepala



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005